

**UPAYA INDONESIA DALAM MENDUKUNG  
UNIFORMED GENDER PARITY STRATEGY 2018-2028**

**Oleh: Muhammad Rizki Syahwal**

*email: muhammad.rizki1886@student.unri.ac.id*

**Pembimbing: Dr. Yessi Olivia, S.IP., M.IntRel**

Bibliografi : 10 Buku, 16 Jurnal, 4 Skripsi, 46 Website, 26 Dokumen

Jurusan Hubungan Internasional

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau

Kampus Bina Widya Jl. H.R Soebrantas KM 12,5 Simp. Baru Pekanbaru

**ABSTRACT**

*This research analyzes Indonesia's efforts to support the Uniformed Gender Parity Strategy 2018-2028. The strategy was created by the Department of Peace Operations (DPO) to set targets for women in UN Peacekeeping Operations (UNPKO) and outlines how the DPO plans to reach those goals. Women are proven to have had a positive impact on the UNPKO. However, in implementation, there is a gender gap where the number of women is not comparable to men. One of the consequences of the gender gap in the UNPKO is the occurrence of sexual exploitation and abuse by male peacekeepers. Therefore, women's participation in the UNPKO is very important.*

*This study used qualitative research methods. The author uses data collection techniques through library research as a research assistant in collecting data or information by reading books, journals, websites, documents such as resolutions, press statements, meeting summaries, and other written materials related to the problem being studied.*

*The results of this research show that Indonesia succeeded in initiating Resolution 2538. Indonesia was elected to become a non-permanent member of the UN Security Council for the 2019-2020 period. Peacekeeping was one of Indonesia's priority issues during his term of office. Under the Indonesian Presidency, the UN Security Council succeeded in passing Resolution 2538 concerning female personnel in the UNPKO. This resolution is clear evidence of Indonesia's contribution to world peace, and is also the first resolution to specifically highlight the role of women in the UNPKO.*

*Keywords: UNPKO, Women Peacekeepers, Security Council*

## PENDAHULUAN

Komitmen Indonesia untuk ikut dalam melaksanakan ketertiban dunia merupakan amanat dari alinea IV Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi "...ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial,...". Komitmen ini senantiasa diwujudkan melalui partisipasi dan kontribusi aktif Indonesia di dalam Operasi Pemeliharaan Perdamaian PBB (OPP PBB). Partisipasi tersebut merupakan indikator penting dan konkrit dari peran suatu negara dalam memberikan kontribusi dalam menjaga perdamaian dan keamanan internasional.<sup>1</sup>

Operasi Pemeliharaan Perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa (*United Nations Peacekeeping*) merupakan peran yang dipegang oleh Departemen Operasi Perdamaian (*Department of Peace Operations*) yang berada di bawah Dewan Keamanan PBB, sebagai instrumen yang dikembangkan sebagai cara untuk membantu negara-negara yang sedang dalam konflik untuk menciptakan kondisi perdamaian yang abadi. *UN Peacekeeping* membantu negara-negara yang sedang berkonflik menavigasi jalan dari konflik menuju perdamaian. *UN Peacekeeping* memiliki kekuatan yang unik, termasuk legitimasi, pembagian beban, dan kemampuan untuk mengerahkan pasukan dan polisi dari seluruh dunia, mengintegrasikan mereka dengan *civilian peacekeepers* (penjaga perdamaian sipil) untuk menangani berbagai mandat yang ditetapkan oleh Dewan Keamanan dan Majelis Umum PBB.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, *Indonesia dan Misi Pemeliharaan Perdamaian PBB*, 29 Januari 2019, [https://kemlu.go.id/portal/id/read/91/halaman\\_list\\_1\\_ainnya/indonesia-dan-misi-pemeliharaan-perdamaian-pbb](https://kemlu.go.id/portal/id/read/91/halaman_list_1_ainnya/indonesia-dan-misi-pemeliharaan-perdamaian-pbb) (diakses 14 Maret, 2023).

<sup>2</sup> United Nations Peacekeeping, *What Peacekeeping Does*, <https://peacekeeping.un.org/en> (diakses 13 Februari, 2023)

PBB merupakan salah satu dari sedikit organisasi yang mampu terlibat langsung di wilayah konflik tanpa gejolak politik militer negara tertentu. Dengan menjalankan operasi pemeliharaan perdamaian di seluruh dunia, PBB mampu memberikan bantuan yang diperlukan bagi negara-negara anggota untuk beralih dari konflik ke perdamaian. Berkontribusi penuh pada Operasi Pemeliharaan Perdamaian PBB sangat penting tidak hanya bagi negara-negara yang berkonflik, tetapi juga bagi negara yang berkontribusi.<sup>3</sup>

Operasi Pemeliharaan Perdamaian PBB (OPP PBB) dimulai tahun 1948, dimana Sekretaris Jenderal PBB mengizinkan pengarahannya ke Timur Tengah. Misi tersebut bertujuan untuk memantau Perjanjian Gencatan Senjata antara Israel dan negara Arab di sekitarnya. Operasi ini dinamakan *United Nations Truce Supervision Organization* (UNTSO).

OPP PBB lahir pada saat Perang Dingin. Pemeliharaan perdamaian awalnya terbatas pada mempertahankan gencatan senjata dan menstabilkan situasi di lapangan, dan memberikan dukungan penting bagi upaya politik untuk menyelesaikan konflik dengan cara damai. Misi-misi tersebut terdiri dari pengamat militer tak bersenjata dan pasukan bersenjata ringan yang memiliki tugas utama yaitu memantau, melaporkan, dan membangun kepercayaan. Dua OPP PBB pertama yang dikerahkan oleh PBB adalah *United Nations Truce Supervision Organization* (UNTSO) yang dimulai dari tahun 1948 dan *UN Military Observer Group in India and Pakistan* (UNMOGIP) yang dimulai pada tahun 1949. Kedua operasi ini mencontohkan jenis operasi observasi dan pemantauan dan memiliki

---

<sup>3</sup> Jonathan Dromgoole, "Why UN Peacekeeping Operations are Important to Us All," *United Nations Association of The United States of America*, 29 Mei 2016, <https://unausa.org/why-un-peacekeeping-operations-are-important-to-us-all/> (diakses 14 Maret, 2023).

kekuatan resmi, dimana pengamat militer PBB tidak dilengkapi dengan senjata.

Dengan berakhirnya Perang Dingin, konteks strategis OPP PBB berubah secara drastis. PBB mengubah dan juga memperluas OPP PBB dari misi 'tradisional' yang umumnya hanya tugas observasi yang melibatkan personel militer, menjadi organisasi 'multidimensi' yang jauh lebih kompleks. Misi multidimensi ini dirancang untuk memastikan penerapan perjanjian perdamaian yang komprehensif dan membantu meletakkan dasar bagi perdamaian yang berkelanjutan. Sifat dari konflik yang ditangani juga berubah selama bertahun-tahun. OPP PBB awalnya dikembangkan sebagai sarana untuk menangani konflik antar negara, namun seiring berjalannya waktu semakin banyak diterapkan pada konflik intra negara dan perang saudara. OPP PBB kini semakin diminta untuk melakukan berbagai macam tugas yang kompleks, mulai dari membantu membangun institusi pemerintahan yang berkelanjutan, hingga pemantauan hak asasi manusia, hingga reformasi sektor keamanan, hingga perlucutan senjata, demobilisasi, dan reintegrasi mantan militer.

Meskipun militer tetap menjadi tulang punggung sebagian besar operasi penjaga perdamaian, sekarang ada banyak wajah penjaga perdamaian termasuk:

- a) Administrator
- b) Ekonom
- c) Petugas kepolisian
- d) Pakar hukum
- e) Pembersih ranjau (*de-miner*)
- f) Pemantau pemilu
- g) Pemantau hak asasi manusia
- h) Spesialis urusan sipil dan pemerintahan
- i) Pekerja kemanusiaan
- j) Ahli komunikasi dan informasi publik

Saat ini, kurang lebih 110.000 staf militer, polisi, dan sipil bertugas di 14 misi penjaga perdamaian, yang mewakili penurunan personel dan misi penjaga

perdamaian sebagai hasil dari transisi damai dan pembangunan kembali negara-negara yang berfungsi. Namun, pengurangan personel dan jumlah misi di tahun-tahun berikutnya sama sekali tidak menunjukkan bahwa tantangan yang dihadapi PBB berkurang. Munculnya konflik baru yang menyebar melampaui batas lokal dan regional menandakan bahwa permintaan untuk misi lapangan diperkirakan akan tetap tinggi dan pemeliharaan perdamaian akan terus menjadi salah satu tugas operasional PBB yang paling kompleks.<sup>4</sup>

Dalam praktiknya, terdapat kesenjangan dalam jumlah pasukan antara perempuan dan laki-laki. Menurut data yang dikeluarkan oleh *UN Peacekeeping*, jumlah pasukan penjaga perdamaian perempuan per Desember 2018 adalah 4.655 dari jumlah total yakni 89.846.<sup>5</sup> Apabila dipersentasekan, jumlah pasukan penjaga perdamaian perempuan hanya mencapai lima persen, hal ini merupakan ketidaksetaraan gender dalam Pasukan Penjaga Perdamaian PBB.

Secara tradisional, militer dan perang dipandang sebagai kegiatan maskulin, dan laki-laki adalah aktor bersenjata yang sah yang berjuang untuk melindungi mereka yang membutuhkan perlindungan, yaitu perempuan, anak-anak, dan laki-laki yang tidak berperang. Pemeliharaan perdamaian dibentuk oleh gagasan maskulin dimana keamanan dikaitkan dengan militerisasi. Wilayah militer dianggap sebagai ranah bagi laki-laki sehingga para personel militer juga didominasi oleh laki-laki. Operasi perdamaian yang didominasi oleh laki-laki cenderung beranggapan bahwa keamanan berarti berhentinya pertempuran antara kelompok yang berkonflik sehingga mengabaikan keamanan perempuan di

---

<sup>4</sup> United Nations Peacekeeping, *Our History*, <https://peacekeeping.un.org/en/our-history> (diakses 14 Juni, 2023).

<sup>5</sup> United Nations Peacekeeping, *Gender Data*, [https://peacekeeping.un.org/sites/default/files/7\\_gender\\_report\\_9.pdf](https://peacekeeping.un.org/sites/default/files/7_gender_report_9.pdf) (diakses 13 Februari, 2023).

depan umum dan di rumah mereka sendiri.<sup>6</sup>

Selain ketidaksetaraan gender, terdapat juga kasus kekerasan seksual yang terjadi dalam Operasi Pemeliharaan Perdamaian PBB, yang pelakunya adalah pasukan penjaga perdamaian itu sendiri. Kasus kekerasan seksual yang dilakukan pertama kali tercatat pada tahun 1992 di Kamboja. Kasus-kasus serupa kemudian muncul dalam operasi perdamaian di Bosnia dan Herzegovina, Haiti, Kongo, Timor Timur, dengan tuduhan mulai dari pemerkosaan, hingga eksploitasi anak di bawah umur.<sup>7</sup> Pada tahun 2006, terdapat 357 tuduhan eksploitasi dan pelecehan seksual yang melibatkan pasukan penjaga perdamaian PBB.<sup>8</sup>

Kasus kekerasan terhadap perempuan seringkali berlanjut pada periode pasca-konflik, bahkan terkadang meningkat daripada selama periode konflik. Kekerasan yang terjadi berupa pemerkosaan, penyerangan seksual, kekerasan dalam rumah tangga, serta prostitusi dengan alasan finansial. Dengan kurangnya keterlibatan perempuan dalam OPP PBB, permasalahan seperti ini seringkali diabaikan karena dianggap isu-isu ‘lunak’ dibandingkan dengan isu-isu keamanan militer.

Perempuan terbukti memberikan dampak positif pada lingkungan

*peacekeeping*, termasuk dalam mendukung peran perempuan dalam membangun perdamaian dan melindungi hak-hak perempuan. Dalam semua bidang pemeliharaan perdamaian, *women peacekeepers* telah membuktikan bahwa mereka dapat melakukan peran yang sama, dengan standar yang sama dan di bawah kondisi sulit yang sama seperti laki-laki.<sup>9</sup> Cendekiawan dan pembuat kebijakan telah mengemukakan banyak kelebihan perempuan sebagai penjaga perdamaian atau *peacekeepers*, petugas penjaga perdamaian perempuan mampu meredakan situasi yang berpotensi kekerasan tanpa menggunakan kekuatan secara lebih efektif daripada petugas pria.<sup>10</sup> Banyak juga yang berpendapat bahwa peran perempuan diperlukan dalam pemeliharaan perdamaian setidaknya sebagian karena mereka dapat diharapkan untuk berperilaku lebih baik daripada rekan pria mereka atau untuk mempengaruhi rekan pria mereka untuk berperilaku lebih baik.<sup>11</sup>

Selain itu, kehadiran penjaga perdamaian perempuan juga dapat meningkatkan penerimaan masyarakat lokal terhadap pasukan penjaga perdamaian. Menjalin komunikasi yang baik dengan penduduk lokal dinilai penting untuk dapat mengatasi kekerasan seksual yang terjadi pada masa konflik. Para penduduk perempuan juga lebih leluasa untuk melaporkan insiden kekerasan seksual yang mereka alami atau temukan kepada para petugas perempuan, Sehingga perempuan dibutuhkan untuk memberikan akses dan dukungan terhadap penduduk perempuan, mendukung kebutuhan spesifik perempuan dan anak-

---

<sup>6</sup> Nadine Puechguirbal, *Peacekeeping, Pracebuilding and Post-conflict Reconstruction* dalam *Gender Matters in Global Politics: a feminist introduction to international relations*, disunting oleh Laura J. Shepherd, (Newyork: Routledge, 2010), 161-175.

<sup>7</sup> Olivera Simić, "Does the Presence of Women Really Matter? Towards Combating Male Sexual Violence in Peacekeeping Operations," *International Peacekeeping*, vol. 17, no. 2 (2010): 190-191.

<sup>8</sup> Brianna Nicole Hernandez, "Sexual Abuse in UN Peacekeeping: The Problem of Viewing Women as a 'Quick Fix'," *E-International Relations*, 20 Februari 2020, <https://www.e-ir.info/2020/02/20/sexual-abuse-in-un-peacekeeping-the-problem-of-viewing-women-as-a-quick-fix/> (diakses 13 Februari, 2023).

---

<sup>9</sup> United Nations Peacekeeping, *Women in Peacekeeping*,

<https://peacekeeping.un.org/en/women-peacekeeping> (diakses 13 Februari, 2023).

<sup>10</sup> Brianna Nicole Hernandez, loc. cit.

<sup>11</sup> Linda Fasulo, "Peace Operations," di dalam *An Insider's Guide to the UN* (London: Yale University Press, 2009).

anak, serta membuat misi menjadi lebih ramah gender.<sup>12</sup>

Keseriusan Dewan Keamanan PBB dalam meningkatkan jumlah pasukan perempuan pertama kali dapat dilihat dalam Resolusi 1325 tentang *Women, Peace, and Security* yang diadopsi pada tanggal 31 Oktober 2000. Dalam resolusi ini menegaskan perang penting perempuan dalam pencegahan dan penyelesaian konflik dan dalam pembangunan perdamaian atau *peace-building*, dan menekankan pentingnya partisipasi yang setara dan keterlibatan penuh dalam semua upaya pemeliharaan dan pemajuan perdamaian dan keamanan, dan kebutuhan untuk meningkatkan peran perempuan dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pencegahan dan penyelesaian konflik.<sup>13</sup>

Departemen Operasi Perdamaian pada tahun 2018 mengeluarkan *Uniformed Gender Parity Strategy 2018-2028*. Strategi ini memiliki tujuan untuk memastikan bahwa Pasukan Penjaga Perdamaian PBB beragam dan melibatkan wanita, yang mencerminkan komunitas yang dilayani oleh PBB. Strategi ini menetapkan target untuk perempuan di Operasi Pemeliharaan Perdamaian dan menguraikan bagaimana rencana Departemen Operasi Perdamaian untuk memenuhi tujuan tersebut.<sup>14</sup>

Perempuan di Indonesia masih dianggap sebagai pendukung laki-laki dan hanya bisa bertanggungjawab dalam pekerjaan domestik. Oleh karena itu, perempuan dianggap tidak memiliki hak untuk berada di ruang publik terutama dalam bidang negara dan pertahanan. Namun, telah terdapat kemajuan dalam

pengarusutamaan gender di bidang militer di Indonesia dengan terbentuknya prajurit Wanita TNI.<sup>15</sup>

Menyadari bahwa partisipasi perempuan Indonesia dalam misi perdamaian PBB masih belum maksimal, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Retno Marsudi, menyatakan bahwa Indonesia harus mengutus lebih banyak personel perempuan. Indonesia mulai mempertimbangkan perekrutan taruna perempuan ke dalam Akademi Militer Indonesia pada tahun 2009, dan mulai merekrut perempuan pada tahun 2013. Berdasarkan data dari *The Global Gender Gap Report*, Indonesia telah menutup *gender gap* sebesar 69%, mengungguli negara lain seperti Pakistan, India, dan Nigeria.<sup>16</sup>

Berdasarkan Pernyataan Pers Tahunan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia (PPTM) Tahun 2021, yang dipublikasikan pada 6 Januari 2021, diketahui bahwa Indonesia merupakan negara nomor 8 penyumbang *peacekeepers* terbesar di dunia. Dari 2.828 *peacekeepers* Indonesia yang bertugas, 163 diantaranya adalah perempuan dan bertugas di 8 Operasi Pemeliharaan Perdamaian PBB.<sup>17</sup>

Pada tanggal 8 Juni 2018, Indonesia terpilih menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB untuk periode 2019-2020, bersama Jerman, Afrika Selatan, Belgia dan Republik Dominika. Keanggotaan Indonesia merupakan yang keempat kalinya setelah

<sup>12</sup> Simon Allison, *Are Women Better Peacekeepers? These UN Officers Think So*, *theguardian*, 17 September 2015, <https://www.theguardian.com/world/2015/sep/17/women-better-peacekeepers-un-officers-think-so> (diakses 24 April 2023).

<sup>13</sup> United Nations, Security Council, *Resolution 1325*, 31 Oktober 2000, hal. 1.

<sup>14</sup> Department of Peace Operations, *Uniformed Gender Parity Strategy 2018-2028*, 2018

<sup>15</sup> Zulvyanie Pilgrimmy F dan Arfin Sudirman, "Peran Korps Wanita TNI sebagai Pasukan Pemeliharaan Perdamaian PBB dalam Humanitarian Assistance di Lebanon", *Indonesia Perspective* Vol 3. No. 2 (2019), 133-149.

<sup>16</sup> World Economic Forum, "The global gender gap report 2017", 2017, <https://www.weforum.org/reports/> (diakses pada 24 April 2023).

<sup>17</sup> Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, "Pernyataan Pers Tahunan Menteri Luar Negeri Tahun 2021," 6 Januari 2021, [https://kemlu.go.id/download/L1NoYXJZCUyME\\_RvY3VtZW50cy9QUFRNJTlWmJAYMS1NZW5s\\_dS\\_UyMFI1JTlW5U5ELnBkZg==](https://kemlu.go.id/download/L1NoYXJZCUyME_RvY3VtZW50cy9QUFRNJTlWmJAYMS1NZW5s_dS_UyMFI1JTlW5U5ELnBkZg==).

sebelumnya menjadi anggota tidak tetap pada tahun 1974-1975, 1995-1996, dan 2007-2008.<sup>18</sup> Dalam pelaksanaannya, Indonesia menetapkan 4 Isu Prioritas dan 1 Isu Perhatian Khusus yakni:

1. Melanjutkan kontribusi Pemerintah RI dalam upaya mewujudkan perdamaian dunia, antara lain melalui memperkuat ekosistem/geopolitik perdamaian dan stabilitas global dengan mengedepankan dialog dan penyelesaian konflik secara damai.
  - a) Promosi penyelesaian sengketa yang damai melalui kemitraan dan regionalism.
  - b) Peningkatan *Peacekeeping* dan *Peacebuilding*:
    - 1) Peningkatan kualitas dan keefektifan misi pemeliharaan perdamaian;
    - 2) Memajukan kemitraan "partnership" dalam *sustaining peace*; dan
    - 3) Meningkatkan peranan perempuan dalam proses perdamaian.
2. Membangun sinergi antara organisasi-organisasi regional untuk menjaga perdamaian dan stabilitas di kawasan. Dalam hal ini ditekankan perlunya penguatan organisasi regional, mengingat tantangan saat ini yang sangat dinamis, maka peran organisasi regional penting dan dibutuhkan untuk menangani masalah.
3. Meningkatkan kerjasama antara negara-negara dan DK PBB untuk memerangi terorisme, ekstremisme dan radikalisme
  - a) Menciptakan pendekatan komprehensif

- b) Mengatasi sumber akar dari terorisme, radikalisme dan *violent extremism*.
4. Pemerintah RI juga akan mencoba mensinergikan upaya penciptaan perdamaian dengan upaya pembangunan yang berkelanjutan
  - a) Memastikan perdamaian, keamanan dan stabilitas untuk memastikan pemenuhan Agenda 2030, termasuk di Afrika
  - b) Membentuk Kemitraan Global dalam membahas implikasi keamanan pada ekonomi, kesehatan dan lingkungan hidup
  - c) Meningkatkan peranan perempuan dalam proses perdamaian.

Di samping itu, Indonesia juga akan memberikan perhatian khusus pada isu Palestina.<sup>19</sup>

Penelitian ini penting karena berdasarkan Isu Prioritas Indonesia dalam pelaksanaan Keanggotaan Tidak Tetap Dewan Keamanan PBB periode 2019-2020, meningkatkan peranan perempuan dalam proses perdamaian merupakan salah satu Isu Prioritas Indonesia. Sebagai salah satu kontributor personel penjaga perempuan terbesar di OPP PBB, perlu diketahui apa upaya yang dilakukan Indonesia dalam meningkatkan peranan perempuan dalam proses perdamaian.

## **KERANGKA TEORI**

### **Perspektif Feminisme**

Pada dasarnya, feminisme menjelaskan mengenai adanya konstruksi gender dalam hubungan internasional dimana peran laki-laki dan perempuan sebagai aktor sama pentingnya di politik dunia. Feminisme mendukung dan menentang asumsi tentang peran gender maskulin dan feminim yang mendikte apa yang harus atau dapat dilakukan oleh perempuan dan laki-laki dalam politik global dan hubungan internasional.

---

<sup>18</sup> Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, *Keanggotaan Indonesia Pada DK PBB*, 8 April 2019, [https://kemlu.go.id/portal/id/read/147/halaman\\_list\\_lainnya/keanggotaan-indonesia-pada-dk-pbb](https://kemlu.go.id/portal/id/read/147/halaman_list_lainnya/keanggotaan-indonesia-pada-dk-pbb) (diakses 21 Maret, 2023).

---

<sup>19</sup> *Ibid.*

Terdapat beberapa asumsi dalam feminisme<sup>20</sup>:

1. Kaum feminis berpendapat bahwa sifat dasar manusia adalah sesuatu yang dapat berubah.
2. Kaum feminis menganggap bahwa kita tidak dapat membuat pembeda antara suatu 'fakta' dan suatu 'nilai'.
3. Pengetahuan dengan kekuasaan memiliki hubungan erat antara 'teori-teori' kita tentang dunia dengan kebiasaan kita, yaitu bagaimana kita melibatkan diri dengan lingkungan fisik dan sosial di sekitar kita.
4. Kaum feminis posmodern itu tersendiri (para postmodernis menolak klaim universalitas), kaum feminis memiliki suatu komitmen yang sama pada ide kemajuan sosial dan kebebasan atau emansipasi kaum perempuan.

Operasi Pemeliharaan Perdamaian mendapatkan perhatian utama dalam studi hubungan internasional sebagai salah satu cara masyarakat internasional untuk mengupayakan perdamaian berkelanjutan setelah konflik. Para ahli teori feminis berpendapat bahwa pemeliharaan perdamaian, sebagai upaya untuk mencari keamanan, dibentuk oleh gagasan maskulin tentang keamanan yang dimiliterisasi. Dalam Operasi Pemeliharaan Perdamaian, perempuan cenderung kurang terwakili.

### **Teori Feminisme Liberal**

Feminisme dalam hubungan internasional merupakan salah satu dari teori-teori alternatif yang pada mulanya lahir dari ilmu sosial dan minim membicarakan mengenai masalah hubungan antar negara. Terdapat tiga pendekatan teoritis feminisme dalam hubungan internasional yaitu feminisme liberal, feminisme marxis atau sosialis, dan

---

<sup>20</sup> Jill Steans & Lloyd Pettiford, *International Relations: Perspective and Themes*, diterjemahkan oleh Deasy Silvy Sari (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), 339.

feminisme radikal.<sup>21</sup> Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori feminisme liberal.

Feminisme liberal membahas mengenai persamaan hak antara laki-laki dan perempuan. Seharusnya perempuan diberikan kesempatan yang sama dengan yang dimiliki laki-laki dalam berbagai aspek seperti pendidikan, ekonomi, politik, dan sebagainya.<sup>22</sup> Kaum liberal memiliki pandangan bahwa usaha yang paling utama untuk meningkatkan status perempuan adalah melalui kesempatan untuk berpartisipasi dalam ruang publik. Mereka berpendapat bahwa perempuan adalah makhluk rasional seperti laki-laki sehingga mempunyai hak untuk ikut serta dalam kehidupan publik, tidak hanya berperan dalam ruang privat di rumah dan keluarga.<sup>23</sup>

Feminisme liberal melihat hubungan internasional sebagai dunia yang didominasi oleh laki-laki. Negara seharusnya bersifat netral dan tidak memihak antara kepentingan kelompok. Namun kaum feminis liberal mengakui bahwa negara belum sepenuhnya adil dan tidak memihak dalam perlakuannya terhadap perempuan. Perwakilan-pewakilan negara umumnya adalah laki-laki, sehingga kepentingan nasional suatu negara seringkali ditetapkan oleh para laki-laki.

Mary Wollstonecraft berpendapat untuk mewujudkan kesetaraan gender bagi perempuan, maka perempuan harus diberikan hak dan kesempatan yang sama dengan laki-laki.<sup>24</sup> Sementara John Stuart

---

<sup>21</sup> Robert Jackson, dan Georg Sorensen, *Pengantar Studi Hubungan Internasional*, diterjemahkan oleh Dadan Suryadipura, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005).

<sup>22</sup> *Ibid.*

<sup>23</sup> Jill Steans & Lloyd Pettiford, *International Relations: Perspective and Themes*, diterjemahkan oleh Deasy Silvy Sari (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hlm. 327.

<sup>24</sup> Ekawati Marhaenny Dukut & Farhana Malik, Wollstone Craft and Friedan's Theories Highlight the Women Struggles in Julius Caesar, *Celt* Vol. 13 No. 2, (2013): 189.

Mill dan Harriet Taylor berpendapat bahwa untuk merubah sistem yang tidak adil maka perempuan itu sendirilah yang harus dibutuhkan perubahan dari dalam perempuan itu sendiri. Namun tujuan yang ingin mereka wujudkan adalah sama, yaitu perempuan harus diberikan kedudukan yang sama dengan laki-laki dalam berbagai aspek kehidupan.

#### **METODE PENELITIAN**

Dalam penelitian ini digunakan metode kualitatif dengan melakukan pengolahan data secara deskriptif analisis. Data yang dianalisis tidak menggunakan statistik atau yang sejenisnya, namun dilakukan dengan menguraikan secara deskriptif dari data yang telah didapatkan. Penelitian kualitatif ini merupakan penelitian yang dilakukan berdasarkan paradigma, strategi, dan implementasi model secara kualitatif.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan mengumpulkan data sekunder dengan teknik *document analysis*, yaitu pengumpulan data melalui dokumen-dokumen, buku, jurnal, serta situs internet yang berkaitan dengan topik pembahasan penelitian.

#### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

##### **Keanggotaan Tidak Tetap Indonesia pada Dewan Keamanan PBB**

Pencalonan Indonesia menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB Periode 2019-2020 disampaikan oleh Juru Bicara Kementerian Luar Negeri, Arrmanantha Nassir pada tahun 2016.<sup>25</sup> Untuk terpilih menjadi anggota tidak tetap DK PBB, suatu negara harus memperoleh suara sebanyak dua pertiga dari total jumlah negara anggota PBB yang hadir pada sesi Majelis Umum. Jika seluruh 193 negara anggota hadir, maka diperlukan minimal sebanyak 129 suara untuk terpilih

menjadi anggota tidak tetap.<sup>26</sup> Indonesia berhasil memenangkan kursi dan mengalahkan Maladewa dengan memperoleh 144 suara dari 190 negara anggota yang hadir. Sementara Maladewa hanya memperoleh 46 Suara.<sup>27</sup>

Pada tanggal 8 Juni 2018, Indonesia terpilih menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB untuk periode 2019-2020. Indonesia dipilih bersama Jerman, Afrika Selatan, Belgia dan Republik Dominika. Indonesia akan memulai masa tugasnya sebagai anggota tidak tetap pada tanggal 1 Januari 2019 hingga 31 Desember 2020. Keanggotaan ini merupakan yang keempat kalinya setelah sebelumnya menjadi anggota tidak tetap pada tahun 1974-1975, 1995-1996, dan 2007-2008. Prinsip dasar pelaksanaan keanggotaan tidak tetap Indonesia di DK PBB adalah Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Dasasila Bandung sebagai produk diplomasi monumental Indonesia yang menjadi landasan tata pergaulan masyarakat dunia.<sup>28</sup>

Menurut Presiden Joko Widodo, kemenangan Indonesia merupakan hasil kerja keras para diplomat selama ini. Kampanye yang dilakukan Indonesia mengedepankan rekam jejak Indonesia dalam pergaulan internasional. Presiden Joko Widodo juga menuturkan empat alasan Indonesia dapat terpilih menjadi anggota tidak tetap DK PBB. Pertama, kondisi Indonesia sebagai negara yang demokratis, stabil, dan damai memberikan

<sup>25</sup> Victor Maulana, "Indonesia Resmi Calonkan Diri Jadi Anggota Tidak Tetap DK PBB," *Sindo News*, 29 September 2016, <https://international.sindonews.com/berita/1143362/40/indonesia-resmi-calonkan-diri-jadi-anggota-tidak-tetap-dk-pbb>.

<sup>26</sup> "Security Council Elections 2018," Security Council Report, 31 Mei 2018, [https://www.securitycouncilreport.org/monthly-forecast/2018%2006/security\\_council\\_elections\\_2018.php](https://www.securitycouncilreport.org/monthly-forecast/2018%2006/security_council_elections_2018.php).

<sup>27</sup> Alexander Haryanto, "Indonesia Terpilih Jadi Anggota DK PBB Usai Kalahkan Maladewa," *tirto.id*, 9 Juni 2018, <https://tirto.id/indonesia-terpilih-jadi-anggota-dk-pbb-usai-kalahkan-maladewa-cL2d>.

<sup>28</sup> Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, *Keanggotaan Indonesia pada DK PBB*, 8 April 2019, [https://kemlu.go.id/portal/id/read/147/halaman\\_list\\_lainnya/keanggotaan-indonesia-pada-dk-pbb](https://kemlu.go.id/portal/id/read/147/halaman_list_lainnya/keanggotaan-indonesia-pada-dk-pbb).

kontribusi yang signifikan pada kemenangan Indonesia. Kedua, rekam jejak diplomatik dan kontribusi Indonesia dalam menjaga perdamaian dunia. Ketiga, politik luar negeri Indonesia yang independen dan netral. Keempat, peran Indonesia dalam menjembatani perbedaan, termasuk di negara-negara yang bertikai.<sup>29</sup>

Kemenangan yang diperoleh Indonesia juga merupakan hasil kerja keras para diplomat dalam melakukan berbagai diplomasi. Ketika proses pencalonan Indonesia menjadi anggota tidak tetap DK PBB masih berlangsung, Indonesia sudah meminta beberapa dukungan dari berbagai negara seperti dari Sierra Leone yang dilakukan di sela-sela rangkaian Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) Luar Biasa ke-5 tahun 2016. Menteri Luar Negeri Sierra Leone HE Samura Kamara menyambut baik permintaan dukungan tersebut. Sebelum itu, Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi juga telah bertemu dengan beberapa Menlu dari berbagai negara seperti Menlu dari Gambia, Afganistan, Tajikisna, Mesir, dan Mauritania.<sup>30</sup>

### **Peran Indonesia sebagai Anggota Tidak Tetap Dewan Keamanan PBB**

Meskipun Indonesia tidak memiliki keistimewaan hak veto seperti Anggota Tetap Dewan Keamanan PBB, Indonesia tetap dapat terlibat dalam pembuatan kebijakan, serta dapat turut memberikan pandangan dalam pengambilan langkah-langkah tertentu untuk menjaga keamanan dan stabilitas global maupun mengenai

permasalahan di berbagai negara. Selama menjabat menjadi anggota tidak tetap DK PBB, Indonesia menjalankan kampanyenya sebagai *a true partner for world peace* dan menjadi *bridge builder* yang menjembatani perbedaan negara-negara anggota Dewan Keamanan serta mendorong kesatuan suara Dewan Keamanan.<sup>31</sup>

Ketika awal menjabat sebagai anggota tidak tetap DK PBB, Indonesia dipercaya untuk memimpin tiga Komite Sanksi yang merupakan komite penting dalam Dewan Keamanan. Ketiga komite tersebut adalah Komite 1267 mengenai sanksi kelompok Al-Qaeda dan ISIS, Komite 1988 mengenai kelompok Taliban di Afganistan, dan Komite 1540 mengenai pencegahan penyebaran senjata pemusnah massal.

Kepemimpinan dan inisiatif Indonesia dalam penanggulangan terorisme dan pencegahan penyebaran senjata pemusnah massal mendapat pengakuan dan apresiasi, tidak hanya dari anggota DK namun juga dari negara-negara anggota PBB lainnya. Indonesia berhasil memprakarsai berbagai Pernyataan Pers DK yang mengutuk serangan terorisme di Afganistan, Iran, Filipina, Selandia Baru dan Sri Lanka. Ini merupakan wujud konsistensi sikap dan posisi Indonesia yang selalu menolak pengkaitan tindakan terorisme dengan agama, suku atau bangsa tertentu.<sup>32</sup>

Sebagai anggota tidak tetap DK PBB, Indonesia mendapat kesempatan

---

<sup>29</sup> Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia, "Faktor Penentu Terpilihnya Indonesia sebagai Anggota Tidak Tetap Dewan Keamanan PBB," 12 Juni 2018, [https://www.setneg.go.id/baca/index/faktor\\_penentu\\_terpilihnya\\_indonesia\\_sebagai\\_anggota\\_tidak\\_tetap\\_dewan\\_keamanan\\_pbb](https://www.setneg.go.id/baca/index/faktor_penentu_terpilihnya_indonesia_sebagai_anggota_tidak_tetap_dewan_keamanan_pbb).

<sup>30</sup> Nur Khafifah, "Indonesia Minta Dukungan Sierra Leone Jadi Anggota Tidak Tetap DK PBB," *Detik News*, 6 Maret 2016, <https://news.detik.com/berita/d-3158500/indonesia-minta-dukungan-sierra-leone-jadi-anggota-tidak-tetap-dk-pbb>.

---

<sup>31</sup> Santi Dewi, "Misi Indonesia agar raih kursi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB," *Rappler*, 22 Januari 2018, <https://www.rappler.com/world/indonesia/194202-indonesia-ingin-jadi-anggota-tidak-tetap-dewan-keamanan-pbb/>.

<sup>32</sup> Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, "Indonesia Pimpin Upaya Penanggulangan Terorisme dan Pencegahan Penyebaran Senjata Pemusnah Massal di Dewan Keamanan PBB," 21 Mei 2019, <https://kemlu.go.id/portal/id/read/274/berita/indonesia-pimpin-upaya-penanggulangan-terorisme-dan-pencegahan-penyebaran-senjata-pemusnah-massal-di-dewan-keamanan-pbb>.

menjabat sebagai Presiden Dewan Keamanan sebanyak dua kali, yaitu pada Mei 2019 dan Agustus 2020. Pada masa Presidensi Mei 2019, Indonesia telah berhasil mengesahkan 4 Resolusi, 1 *Presidential Statement*, 3 Pernyataan Pers, dan 3 *Element to the Press* (Elemen bagi Pers). Indonesia juga memperkenalkan *working method* baru yang inovatif yaitu “*Sofa Talk*” dan *Regional Wrap-up Session*, dan menampilkan *soft power* diplomasi Indonesia melalui diplomasi batik, Tari Saman Gayo Aceh, dan lagu-lagu khas daerah.<sup>33</sup>

Resolusi-resolusi yang berhasil disahkan Indonesia adalah: Pertama, Indonesia mengesahkan Resolusi 2469 mengenai perpanjangan mandat UNISFA yang merupakan OPP PBB di Abyei. Abyei yang merupakan wilayah yang sedang diperebutkan oleh Sudan dan Sudan Selatan. Kedua, Indonesia mengesahkan Resolusi 2470 mengenai perpanjangan mandat UNAMI yang merupakan OPP PBB di Irak. Ketiga, pengesahan Resolusi 2471 dimana DK PBB memutuskan untuk memperbarui tindakannya di Sudan Selatan dan memperpanjang mandat Panel Ahli. Keempat, mengesahkan Resolusi 2472 mengenai perpanjangan mandat AMISOM yang merupakan OPP PBB di Somalia.

Dari awal Indonesia sudah menempatkan Palestina sebagai isu perhatian khusus yang dibawa Indonesia selama menjadi anggota tidak tetap DK PBB. Ketika Indonesia menjabat sebagai Presiden DK PBB pada Mei 2019, Dewan Keamanan mengadakan pembekalan mengenai Palestina yang dipimpin oleh Menteri Luar Negeri, Retno Marsudi. Dalam acara tersebut, Dewan Keamanan mendapatkan laporan terbaru mengenai kondisi di Palestina. Koordinator khusus

untuk proses perdamaian Timur Tengah, Nockolay Mladenov, mengatakan bahwa kekerasan merupakan pertempuran yang paling intens. Situasi di Tepi Barat termasuk Yerusalem Timur semakin memprihatinkan meskipun Gaza sudah mendapatkan perhatian. Pembangunan pemukiman oleh Israel di wilayah Palestina menjadi hambatan besar bagi perdamaian. Pembekalan yang dipimpin Indonesia ini diharapkan dapat meningkatkan dukungan negara-negara anggota Dewan Keamanan PBB terhadap Palestina. Dalam pertemuan tersebut, Komisaris Jenderal *The United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East* (UNRWA) atau Badan Bantuan dan Pekerjaan PBB untuk Pengungsi Palestina di Timur Dekat mengatakan bahwa UNRWA mendapatkan dukungan yang luar biasa. Dewan Keamanan pun menganggap UNRWA sebagai bagian yang penting dan perlu untuk diberikan dukungan.

Dalam berbagai kesempatan, Indonesia selalu menegaskan dukungannya terhadap Palestina. Seperti pada Debat Terbuka Dewan Keamanan mengenai situasi di Timur Tengah pada Oktober 2019, Indonesia yang diwakili oleh Dubes Djani menyampaikan kembali dukungan penuh terhadap rekonsiliasi dan persatuan Palestina. Indonesia juga mengajak dunia internasional untuk mendukung upaya UNRWA dalam membantu masyarakat Palestina.<sup>34</sup>

Sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan, Indonesia dapat menjadi *agenda setter* isu-isu yang menjadi prioritasnya termasuk isu Palestina. Ketika Indonesia menjabat sebagai Presiden

---

<sup>33</sup> Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, “Kemlu RI Gelar Bincang Santai Peran Indonesia dalam DK PBB,” 29 November 2019, <https://kemlu.go.id/portal/id/read/839/berita/kemlu-ri-gelar-bincang-santai-peran-indonesia-dalam-dk-pbb#>.

---

<sup>34</sup> Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, “Indonesia Tegaskan Kembali Komitmen Dukungan kepada Kemerdekaan Palestina pada Debat Terbuka Dewan Keamanan PBB,” 28 Oktober 2019, <https://kemlu.go.id/newyork-un/id/news/2913/indonesia-tegaskan-kembali-komitmen-dukungan-kepada-kemerdekaan-palestina-pada-debat-terbuka-dewan-keamanan-pbb>.

Dewan pada Agustus 2020, Indonesia kembali membahas mengenai permasalahan Palestina. Indonesia sebagai Presiden memimpin pertemuan virtual Dewan Keamanan pada 25 Agustus 2020 yang mendorong Israel untuk menghentikan aneksasi yang tidak hanya untuk sementara namun untuk selamanya. Indonesia juga mendorong masyarakat internasional untuk memastikan solusi yang komprehensif. Indonesia meminta semua pihak yang terkait khususnya pihak-pihak di kawasan untuk kembali melakukan proses diplomasi dan negosiasi. Negara anggota Dewan Keamanan pun menegaskan kembali dukungannya terhadap penyelesaian konflik Israel-Palestina berdasarkan *two-state solution* sebagai solusi damai bagi penyelesaian konflik tersebut.<sup>35</sup>

Perjalanan Indonesia sebagai anggota tidak tetap DK PBB tentu tidak berjalan mulus begitu saja. Terdapat beberapa hambatan yang dialami Indonesia seperti konflik kepentingan di antara anggota permanen DK PBB. Beberapa permasalahan tertentu bahkan belum dapat terselesaikan, seperti permasalahan Palestina yang masih berlangsung hingga saat ini. Namun, Indonesia terus berusaha menjadi *agenda setter* dan terus mengusahakan perdamaian pada konflik Palestina.

Indonesia juga mengalami hambatan ketika ingin mengusulkan resolusi mengenai penanggulangan terorisme yang berisi panduan penuntutan, rehabilitasi, dan reintegrasi mantan kombatan teroris. Indonesia diveto oleh Amerika Serikat yang merupakan anggota tetap Dewan Keamanan yang membuat resolusi yang diusulkan Indonesia tidak bisa disahkan meskipun telah

mendapatkan dukungan dari 14 negara anggota lainnya. Amerika Serikat yang diwakili oleh Dubes AS untuk PBB menilai bahwa resolusi yang diusulkan Indonesia gagal untuk menyertakan langkah pemulangan kombatan teroris asing ke negara asal yang dinilai sebagai langkah penting dalam menanggulangi terorisme. Namun pada sidang terakhir di tahun 2020, Indonesia bersama dengan AS menginisiasi resolusi 2560 mengenai perbaikan metode kerja Komite Sanksi 1267 yang kemudian disetujui oleh negara anggota Dewan Keamanan.<sup>36</sup>

Ketika Indonesia menjabat sebagai Presiden Dewan Keamanan pada Agustus 2020, Indonesia telah memimpin 12 pertemuan terbuka, 12 pertemuan tertutup, 5 agenda tambahan, 12 pertemuan Badan Subsider Dewan Keamanan, dan 3 Pernyataan Pers/Elemen bagi Pers. Indonesia juga memprakarsai dan memimpin berbagai pertemuan penting lainnya, seperti *breakfast meeting* dan *sofa talks* dengan para Duta Besar DK PBB di Kantor Perutusan Tetap RI untuk PBB di New York, pertemuan dengan Sekjen PBB, *briefing* kepada anggota PBB di awal dan akhir Presidensi, serta *briefing* kepada LSM dan media yang khusus meliput PBB.<sup>37</sup>

Di bawah Presidensi Indonesia, DK PBB telah mengeahkan sebanyak 4 Resolusi, yakni:<sup>38</sup>

<sup>35</sup> Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, "Pimpin DK PBB, Indonesia Tegaskan Rencana Israel Aneksasi Palestina Harus Dibatalkan," 25 Agustus 2020, <https://kemlu.go.id/newyork-un/en/news/8194/pimpin-dk-pbb-indonesia-tegaskan-rencana-israel-aneksasi-palestina-harus-dibatalkan>.

<sup>36</sup> Kumparan News, "Walau AS Veto, RI Bisa Ajukan Lagi Resolusi Penanggulangan Terorisme," 1 September 2020, <https://kumparan.com/kumparannews/walau-as-veto-ri-bisa-ajukan-lagi-resolusi-penanggulangan-terorisme-1u7GegleHCz/full>.

<sup>37</sup> Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, "Selesai Agustus 2020, Ini Capaian Indonesia Sebagai Presidensi Dewan Keamanan PBB," 1 September 2020, <https://setkab.go.id/selesai-agustus-2020-ini-capaian-indonesia-sebagai-presidensi-dewan-keamanan-pbb/>.

<sup>38</sup> Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, "Akhiri Presidensi DK PBB, Indonesia Tuai Penghargaan Dunia," 1 September 2020, <https://kemlu.go.id/portal/id/read/1638/berita/akhiri-presidensi-dk-pbb-indonesia-tuai-penghargaan-dunia>.

1. Resolusi perpanjangan mandat misi pemeliharaan perdamaian di Lebanon (UNIFIL).
2. Resolusi perpanjangan mandat misi pemeliharaan perdamaian di Somalia (UNSOM).
3. Resolusi perpanjangan rezim sanksi di Mali.
4. Resolusi tentang personel penjaga perdamaian perempuan yang diprakarsai Indonesia.

### **Resolusi 2538 Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa**

*Peacekeeping* adalah salah satu prioritas Indonesia selama masa jabatannya di Dewan Keamanan PBB pada tahun 2019-2020. Ketika pertama kali menjabat sebagai Presiden DK PBB pada tahun 2019, Indonesia menyelenggarakan debat terbuka tingkat tinggi pada tanggal 7 Mei bertajuk “*Investing in Peace: Delivering Quality Training and Capacity Building to Improve Safety and Security and Performance of UN Peacekeepers*”. Menteri Luar Negeri Indonesia, Retno Marsudi, menekankan pentingnya menjadikan “penjaga perdamaian lebih kondusif dengan masuknya pasukan penjaga perdamaian perempuan” dalam pidatonya.<sup>39</sup>

Di bawah Presidensi Indonesia, pada 28 Agustus 2020, Dewan Keamanan PBB berhasil mengesahkan secara konsensus Resolusi 2538 (2020) mengenai personel perempuan dalam Operasi Pemeliharaan Perdamaian PBB. Resolusi ini merupakan kontribusi nyata Indonesia dalam diplomasi perdamaian. Menteri Luar Negeri Indonesia, Retno Marsudi, menyatakan bahwa Resolusi 2538 ini merupakan resolusi pertama dalam sejarah diplomasi Indonesia di DK PBB. Hal ini sekaligus merupakan wujud sumbangsih Indonesia dalam meningkatkan peran

perempuan sebagai agen perdamaian, khususnya dalam operasi pemeliharaan perdamaian PBB.<sup>40</sup>

Tidak ada penolakan dari anggota Dewan Keamanan terhadap resolusi ini dan diharapkan dapat diadopsi dengan suara bulat. Bagian penting dari resolusi ini menguraikan beberapa cara yang dapat dilakukan negara-negara anggota untuk mendorong peningkatan partisipasi perempuan dalam pemeliharaan perdamaian.

Pada saat perancangan Resolusi 2538, beberapa negara anggota, termasuk Tiongkok memperingatkan agar tidak menggunakan bahasa yang terlalu preskriptif mengenai tindakan negara-negara anggota, dengan alasan bahwa Dewan Keamanan bukanlah tempat untuk melakukan hal tersebut. Hal ini menghasilkan kompromi seperti dorongan bagi negara untuk mempertimbangkan cara-cara yang tepat untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam militer dan kepolisian nasional.<sup>41</sup>

Resolusi 2538 dibuat menyadari pentingnya peringatan 20 tahun Resolusi DK PBB 1325 (2000) dan peringatan 25 tahun *Beijing Declaration and Platform for Action* sebagai momentum bagi negara-negara anggota untuk berkomitmen mengimplementasikan *Women, Peace, and Security* dan agenda keamanan dan prioritasnya, dengan memastikan dan mempromosikan partisipasi penuh, setara dan bermakna dari perempuan dalam proses perdamaian, termasuk melalui pengarusutamaan perspektif gender, dan tetap berkomitmen untuk meningkatkan jumlah perempuan sipil dan berseragam dalam pemeliharaan perdamaian di semua

<sup>39</sup> Security Council Report, “Women in Peacekeeping Operations: Adoption of a Resolution,” 27 Agustus 2020, <https://www.securitycouncilreport.org/whatsinblue/2020/08/women-in-peacekeeping-operations-adoption-of-a-resolution.php>.

<sup>40</sup> Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, “Dewan Keamanan PBB Sahkan Resolusi Indonesia tentang Penjaga Perdamaian Dunia Perempuan,” 29 Agustus 2020, <https://kemlu.go.id/portal/id/read/1632/berita/dewan-keamanan-pbb-sahkan-resolusi-indonesia-tentang-penjaga-perdamaian-dunia-perempuan>.

<sup>41</sup> Security Council Report, loc. cit.

tingkatan dan di semua posisi, termasuk posisi kepemimpinan senior.

Resolusi ini juga mengakui peran perempuan yang sangat diperlukan dalam meningkatkan keseluruhan kinerja dan keefektifan operasi pemeliharaan perdamaian, mengakui lebih lanjut bahwa kehadiran perempuan dan keseimbangan yang lebih baik antara laki-laki dan perempuan di antara para penjaga perdamaian yang berkontribusi, di antara yang lain, kredibilitas misi yang lebih besar di antara penduduk, pendekatan terhadap komunitas yang lebih efektif, dan respons perlindungan yang lebih baik.<sup>42</sup>

Setelah berhasil mengesahkan resolusi, Indonesia terus mendorong implementasi resolusi tersebut. Sejalan dengan pernyataan Presiden Dewan Keamanan pada Mei 2019, Indonesia mendorong peningkatan kemitraan dalam pelatihan dan pembangunan kapasitas dan menekankan pentingnya keamanan dan keselamatan para personel selama bertugas dalam misi. Indonesia juga mengingatkan kembali pentingnya OPP PBB yang harus didukung oleh mandat yang jelas dan realistis serta terdapat dukungan sumber daya yang mencukupi.<sup>43</sup>

Selain itu, dalam upaya untuk memastikan keterlibatan perempuan dalam perdamaian, Indonesia menyelenggarakan *Regional Training on Women, Peace, and Security* pada 8-10 April 2019 yang dihadiri sekitar 60 diplomat perempuan anggota ASEAN, Timor Leste, dan Papua Nugini. Kegiatan ini merupakan wadah pembelajaran bagi diplomat muda wanita untuk menganalisis dan mencegah konflik

serta membangun perdamaian pasca konflik.<sup>44</sup>

Resolusi ini merupakan terobosan penting, karena untuk pertama kalinya Dewan Keamanan PBB meloloskan resolusi yang secara khusus mengangkat peran personel perempuan dalam OPP PBB. Resolusi ini juga tergolong langka karena disponsori bersama oleh seluruh anggota Dewan Keamanan PBB. Resolusi yang digagas Indonesia ini disponsori oleh 97 negara anggota PBB, termasuk seluruh anggota DK PBB.

Dukungan yang luar biasa dari negara-negara anggota PBB tidak lepas dari konsistensi Indonesia dalam memperjuangkan diplomasi perdamaian dan pemberdayaan peran perempuan dalam perdamaian sejak awal keanggotaannya di Dewan Keamanan PBB pada tahun 2019. Hal ini sekaligus merupakan bukti peran aktif Indonesia sebagai “*bridge builder*” yang tidak hanya berhasil jembatani perbedaan posisi, tetapi juga berhasil mempersatukan anggota DK PBB. Menteri Luar Negeri Indonesia juga menegaskan, dukungan atas inisiatif Indonesia ini tidak terlepas dari diplomasi, kredibilitas dan rekam jejak Indonesia dalam OPP PBB, termasuk kiprah personel perempuan Indonesia di berbagai OPP PBB.

Pasukan perdamaian perempuan Indonesia selama ini diakui perannya dalam mendekati diri dengan masyarakat setempat di wilayah konflik, khususnya dalam perlindungan perempuan dan anak. Pada tahun 2020, personel perempuan di OPP PBB berjumlah 5.327 atau 6,4% dari total 82.245 personel. Indonesia merupakan salah satu kontributor personel perempuan terbesar dengan 158 personel pada tahun 2020

---

<sup>42</sup> United Nations Security Council, “Resolution 2538 (2020),” 28 Agustus 2020.

<sup>43</sup> Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, “Indonesia Dorong Implementasi Resolusi DK PBB 2538 mengenai Pasukan Penjaga Perdamaian Perempuan,” 14 September 2020, <https://kemlu.go.id/newyork-un/en/news/8427/indonesia-dorong-implementasi-resolusi-dk-pbb-2538-mengenai-pasukan-penjaga-perdamaian-perempuan>.

---

<sup>44</sup> Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, “Regional Training on Women, Peace and Security: Peran Penting Perempuan sebagai Agen Perdamaian Dunia,” 10 April 2019, <https://kemlu.go.id/portal/id/read/174/berita/regional-training-on-women-peace-and-security-womens-important-roles-as-global-peace-agents>.

yang bertugas di tujuh OPP PBB yaitu Lebanon, Republik Demokratik Kongo, Republik Afrika Tengah, Sudan Selatan, Darfur, Mali, dan Sahara Barat. Sepanjang tahun hingga tahun 2020 Indonesia telah mengirim lebih dari 570 personel perempuan ke berbagai OPP PBB.<sup>45</sup>

Sesuai dengan poin ketiga dari Resolusi 2538, bahwasanya Indonesia mengimbau Sekretaris Jenderal PBB untuk terus menerapkan *System-Wide Strategy on Gender Parity* dan juga *Uniformed Gender Parity Strategy 2018-2028* serta terus memantau dan mengevaluasi pencapaian targetnya. Indonesia juga meminta semua negara anggota PBB untuk terus mendukung strategi tersebut, dalam rangka meningkatkan jumlah perempuan dalam Operasi Pemeliharaan Perdamaian PBB.

## KESIMPULAN

Indonesia memiliki komitmen untuk ikut dalam pelaksanaan ketertiban dunia, sebagaimana disebutkan dalam alinea IV Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi "...ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial...". Komitmen ini diwujudkan melalui partisipasi dan kontribusi aktif Indonesia dalam Operasi Pemeliharaan Perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa (OPP PBB).

Operasi Pemeliharaan Perdamaian PBB (*United Nations Peacekeeping*) merupakan peran yang dipegang oleh Departemen Operasi Perdamaian (*Department of Peace Operations*) yang berada di bawah Dewan Keamanan PBB, sebagai instrumen yang dikembangkan sebagai cara untuk membantu negara-negara yang berada dalam konflik untuk menciptakan kondisi perdamaian.

OPP PBB menjadi salah satu alat yang paling efektif untuk menanggapi tantangan perdamaian dan keamanan

global saat ini. Namun dalam pelaksanaannya, OPP PBB tidak lepas dari permasalahan, salah satunya adalah disparitas gender. Pada tahun 1993, penjaga perdamaian perempuan adalah sebanyak 1%. Pada tahun 2018, penjaga perdamaian perempuan adalah 4.655 dari 89.846 jumlah total personel, apabila dipersentasekan hanya mencapai 5%.

Perempuan terbukti telah memberikan dampak positif dalam lingkungan pemeliharaan perdamaian (*peacekeeping*). Banyak ahli yang mengemukakan kelebihan perempuan sebagai penjaga perdamaian (*peacekeepers*), diantaranya yakni mampu meredakan situasi yang berpotensi kekerasan tanpa menggunakan kekuatan, meningkatkan kinerja secara keseluruhan, memiliki akses yang lebih besar terhadap masyarakat terutama perempuan dan anak-anak, menjadi teladan atau mentor bagi perempuan dan anak perempuan setempat, dan masih banyak manfaat lainnya.

Feminisme liberal menegaskan mengenai persamaan hak antara laki-laki dan perempuan. Seharusnya perempuan diberikan kesempatan yang sama dengan laki-laki dalam berbagai aspek seperti pendidikan, ekonomi, politik dan sebagainya. Kaum feminisme liberal memiliki pandangan bahwa usaha yang paling utama untuk meningkatkan status perempuan adalah melalui kesempatan untuk berpartisipasi dalam ruang publik. Mereka berpendapat bahwa perempuan adalah makhluk rasional seperti laki-laki sehingga mempunyai hak untuk ikut serta dalam kehidupan publik, tidak hanya berperan dalam ruang privat di rumah dan keluarga. Perempuan penjaga perdamaian telah membuktikan bahwa mereka dapat melakukan peran yang sama, dengan standar yang sama dan di bawah kondisi sulit yang sama seperti laki-laki.

Keseriusan Dewan Keamanan PBB dalam meningkatkan jumlah *women peacekeepers* pertama kali dibuktikan dengan diadopsinya Resolusi 1325 tentang *Women, Peace, and Security* pada tanggal

---

<sup>45</sup> Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, loc. cit.

31 Oktober 2000. Sejak diadopsinya resolusi ini, beberapa upaya untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam OPP PBB sudah dilakukan, namun faktanya perempuan masih kurang terwakili di semua tingkatan *peacekeeping*. Pada tahun 2018, Departemen Operasi Perdamaian mengeluarkan *Uniformed Gender Parity Strategy 2018-2028* yang menetapkan tujuan-tujuan khusus untuk partisipasi perempuan dalam kontingen militer, polisi dan sipil dalam OPP PBB.

Pada tanggal 8 Juni 2018, Indonesia resmi terpilih menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB untuk periode 2019-2020. *Peacekeeping* merupakan salah satu prioritas Indonesia selama masa jabatannya. Di bawah Presidensi Indonesia, pada 28 Agustus 2020, Dewan Keamanan PBB berhasil mengesahkan Resolusi 2538 mengenai personel perempuan dalam OPP PBB. Personel penjaga perdamaian perempuan Indonesia selama ini diakui perannya. Indonesia merupakan salah satu kontributor personel perempuan terbesar dan selalu menduduki peringkat 10 besar dari tahun 2017 hingga 2020. Resolusi ini merupakan kontribusi nyata dari Indonesia dalam perdamaian, terutama dalam meningkatkan peran perempuan sebagai agen perdamaian.

Resolusi 2538 merupakan terobosan penting, karena untuk pertama kalinya Dewan Keamanan PBB meloloskan resolusi yang secara khusus mengangkat peran personel perempuan dalam OPP PBB. Resolusi ini juga tergolong langka karena didukung oleh seluruh anggota Dewan Keamanan PBB. Resolusi yang digagas Indonesia ini juga didukung oleh 97 negara anggota PBB. Sesuai dengan poin ketiga dari resolusi ini, Indonesia mengimbau Sekjen PBB untuk terus menerapkan *Uniformed Gender Parity Strategy 2018-2028* serta terus memantau dan mengevaluasi pencapaian targetnya. Indonesia juga meminta semua negara anggota PBB untuk terus mendukung strategi tersebut, dalam rangka

meningkatkan jumlah perempuan dalam OPP PBB.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Bowen, Glenn A. "Document Analysis as a Qualitative Research Method." *Qualitative Research Journal Vol. 9 No. 2*, 2009: 1-2.
- Carlsnaes, Walter, Thomas Risse, dan Beth A Simmons. *Handbook Hubungan Internasional, diterjemahkan oleh Imam Baehaqie*. Bandung: Penerbit Nusa Media, 2013.
- Fasulo, Linda. "Peace Operations." Dalam *An Insider's Guide to the UN*. London: Yale University Press, 2009.
- Fernandez, Mauricio, dan Luis Fernando Valdes. "The International Relations Theory Under a Feminist Approach." *Revista De Relaciones Internacionales Vol. 11 No. 1*, 2016: 58.
- Ferrari, Sofia Sacks. "Is the United Nations Uniformed Gender Parity Strategy on track to reach its goals?" *Stockholm International Peace Research Institute*. 12 Desember 2019. <https://www.sipri.org/commentary/topical-background/2019/united-nations-uniformed-gender-parity-strategy-track-reach-its-goals#:~:text=The%20Uniformed%20Gender%20Parity%20Strategy%20identifies%20country%2D%20and%20operation%2Dlevel,specific%20policies%2> (diakses Februari 20, 2023).
- Fibrianto, Alan Sigit. "Kesetaraan Gender Dalam Lingkup Organisasi Mahasiswa Universitas Sebelas Maret Surakarta Tahun 2016." *Jurnal Analisis Sosiologi Vol. 5 No. 1*, 2016: 14.

- Hernandez, Brianna Nicole. "Sexual Abuse in UN Peacekeeping: The Problem of Viewing Women as a 'Quick Fix'." *E-International Relations*. 20 Februari 2020. <https://www.e-ir.info/2020/02/20/sexual-abuse-in-un-peacekeeping-the-problem-of-viewing-women-as-a-quick-fix/> (diakses Februari 13, 2023).
- Jackson, Robert, dan Georg Sorensen. *Pengantar Studi Hubungan Internasional, diterjemahkan oleh Dadan Suryadipura*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.
- Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. *Dewan Keamanan PBB Sahkan Resolusi Indonesia tentang Penjaga Perdamaian Dunia Perempuan*. 29 Agustus 2020. [https://kemlu.go.id/portal/id/read/1632/berita/dewan-keamanan-pbb-sahkan-resolusi-indonesia-tentang-penjaga-perdamaian-dunia-perempuan#:~:text=%E2%80%9CResolusi%202538%20\(2020\)%20ini,Menteri%20Luar%20Negeri%20Retno%20Marsudi](https://kemlu.go.id/portal/id/read/1632/berita/dewan-keamanan-pbb-sahkan-resolusi-indonesia-tentang-penjaga-perdamaian-dunia-perempuan#:~:text=%E2%80%9CResolusi%202538%20(2020)%20ini,Menteri%20Luar%20Negeri%20Retno%20Marsudi) (diakses Februari 13, 2023).
- . *Keanggotaan Indonesia pada DK PBB*. 8 April 2019. [https://kemlu.go.id/portal/id/read/147/halaman\\_list\\_lainnya/keanggotaan-indonesia-pada-dk-pbb](https://kemlu.go.id/portal/id/read/147/halaman_list_lainnya/keanggotaan-indonesia-pada-dk-pbb) (diakses Februari 20, 2023).
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2002.
- Komnas Perempuan. *Siaran Pers Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) dan Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas)*. 24 November 2020. <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-komisi-nasional-anti-kekerasan-terhadap-perempuan-komnas-perempuan-dan-lembaga-ketahanan-nasional-lemhanas-24-november-2020> (diakses Februari 23, 2023).
- Mas'oed, Mohtar. *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi*. Jakarta: LP3ES, 1990.
- O'Reilly, Marie, Andrea Ó Súilleabháin, dan dan Thania Paffenholz. *Reimagining Peacemaking: Women's Roles in Peace Processes*. New York: International Peace Institute, 2015.
- Rourke, John T. *International Politics on the World Stage, 5th ed.* Connecticut: Dushking Publishing Group, 1995.
- Simić, Olivera. "Does the Presence of Women Really Matter? Towards Combating Male Sexual Violence in Peacekeeping Operations." *International Peacekeeping Vol. 17 No. 2*, 2010: 190-191.
- Tamaki, Taku. "Level Analysis of the International System." Dalam *Encounters with World Affairs*, oleh Emilian Kavalski, 2. London: Ashagate Publishing, 2019.
- UN Security Council. *Uniformed Gender Parity Strategy 2018-2028*. Department of Peace Operations, 2018.
- United Nations Peacekeeping. *Department of Peace Operations*. t.thn. <https://peacekeeping.un.org/en/department-of-peace-operations> (diakses Februari 13, 2023).
- . *Department of Peace Operations*. t.thn. <https://peacekeeping.un.org/en/department-of-peace-operations> (diakses Februari 23, 2023).

—. *Gender Data*. 31 Desember 2018.  
[https://peacekeeping.un.org/sites/default/files/7\\_gender\\_report\\_9.pdf](https://peacekeeping.un.org/sites/default/files/7_gender_report_9.pdf)  
(diakses Februari 13, 2023).

—. *What Peacekeeping Does*. t.thn.  
<https://peacekeeping.un.org/en>  
(diakses Februari 13, 2023).

—. *Women in Peacekeeping*. t.thn.  
<https://peacekeeping.un.org/en/women-peacekeeping> (diakses  
Februari 13, 2023).

United Nations. *Resolution 1325*. Resolusi,  
Security Council, 2000.

—. *Security Council*. t.thn.  
<https://www.un.org/securitycouncil>  
/ (diakses Februari 23, 2023).

Youngs, Gillian. "Feminist International  
Relations: a contradiction in terms?  
Or: why women and gender are  
essential to understanding the  
world 'we' live in." *Journal  
International Affairs Vol. 80 No. 1*,  
2004: 78.